BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4509);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 6/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 59);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 60);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 18/A);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 5/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
    a. Laporan Realisasi Anggaran;
    b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    c. Neraca;
    d. Laporan Operasional;
    e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.255.876.316.829,13	
b. Belanja dan Transfer	Rp	2.282.937.756.905,57	
Defisit			Rp (27.061.440.076,44)
c. Pembiayaan:			
1. Penerimaan	Rp	176.531.898.604,37	
2. Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan Netto			Rp 176.531.898.604,37

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp71.153.622.370,44 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.184.722.694.458,69
2. Realisasi	Rp	2.255.876.316.829,13
Selisih lebih	Rp	71.153.622.370,44

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(78.285.136.157,38) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.361.222.893.062,95
2. Realisasi	Rp	2.282.937.756.905,57
Selisih kurang	Rp	(78.285.136.157,38)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp149.438.758.527,82 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(176.500.198.604,26)
2. Realisasi	Rp	(27.061.440.076,44)
Selisih lebih	Rp	149.438.758.527,82

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(14.968.299.999,89) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	191.500.198.604,26
2. Realisasi	Rp	176.531.898.604,37
Selisih kurang	Rp	(14.968.299.999,89)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(15.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	0,00
Selisih kurang	Rp	(15.000.000.000,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp31.700.000,11 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	176.500.198.604,26
2. Realisasi	Rp	176.531.898.604,37
Selisih lebih	Rp	31.700.000,11

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	176.500.198.604,26
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	176.500.198.604,37
Subtotal (a-b)	Rp	(0,11)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	149.470.458.527,93
Subtotal (a-b)+ c	Rp.	149.470.458.527,82
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,11
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	149.470.458.527,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	4.469.504.443.760,58
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	46.567.712.367,82
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	4.422.936.731.392,76

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	Pendapatan -LO	Rp	2.054.120.683.254,23
b.	Beban - LO	Rp	2.047.903.599.724,60
	Surplus dari Operasi	Rp	6.217.083.529,63
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,0
d.	Surplus sebelum Pos Luar Biasa	Rp	6.217.083.529,63
e.	Pos Luar Biasa	Rp	656.211.621,92
	Surplus - LO	Rp	5.560.871.907,71

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp	176.496.298.604,26
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	242.898.058.660,65
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(269.959.696.737,09)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	31.700.000,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	273.576.926,11
f.	Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	198.000
g.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp	149.740.135.453,93

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.412.630.524.904,00
b.	Surplus - LO	Rp	5.560.871.907,71

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

-	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
-	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
-	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	4.745.334.581,05
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.422.936.731.392,76

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Neraca;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
u. Lampiran XXI : Ikhtisar Rekapitulasi Laporan Realisasi APBDesa.

Pasal 11

Bupati Blitar menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 1/A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 97-3/2021

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 Audited	%	REALISASI 2019 Audited
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	76.616.092.000,00	89.506.182.946,37	116,82	96.512.500.208,81
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	16.482.025.497,00	18.899.793.279,00	114,67	19.458.062.217,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.243.125.239,00	1.904.856.239,00	84,92	2.390.396.738,95
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	153.230.145.498,59	192.229.230.211,76	125,45	167.381.756.534,10
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**248.571.388.234,59**	**302.540.062.676,13**	**121,71**	**285.742.715.698,86**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
9	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.a	26.600.393.076,00	25.908.968.528,00	97,40	15.629.649.121,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.b	56.010.753.271,00	63.554.666.569,00	113,47	77.761.304.331,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.c	1.067.772.656.000,00	1.056.024.896.000,00	98,90	1.153.914.324.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.d	325.581.171.485,00	324.410.409.191,00	99,64	374.989.099.138,00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**1.475.964.973.832,00**	**1.469.898.940.288,00**	**99,59**	**1.622.294.376.590,00**
15	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	5.1.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.a	236.771.599.000,00	236.771.599.000,00	100,00	208.803.347.200,00
17	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya (16)**		**236.771.599.000,00**	**236.771.599.000,00**	**100,00**	**208.803.347.200,00**
18	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.a	114.589.089.914,00	145.432.298.065,00	126,92	182.140.214.247,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (19 s/d 20)**		**114.589.089.914,00**	**145.432.298.065,00**	**126,92**	**182.140.214.247,00**
22	**BANTUAN KEUANGAN**	5.1.1.2.4				
23	Bantuan dari Pemerintah Provinsi lainnya	5.1.1.2.4.1	8.643.931.000,00	8.643.931.000,00	100,00	9.055.819.000,00
24	**Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (23)**		**8.643.931.000,00**	**8.643.931.000,00**	**100,00**	**9.055.819.000,00**
25	**Jumlah Pendapatan Transfer (9+15+18+22)**		**1.835.969.593.746,00**	**1.860.746.768.353,00**	**101,35**	**2.022.293.757.037,00**
26	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	100.181.712.478,10	92.589.485.800,00	92,42	92.995.480.000,00
28	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (27)**		**100.181.712.478,10**	**92.589.485.800,00**	92,42	**92.995.480.000,00**
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7+25+28)**		**2.184.722.694.458,69**	**2.255.876.316.829,13**	103,26	**2.401.031.952.735,86**
30	**BELANJA**	5.1.2				
31	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	904.088.558.688,39	875.134.545.181,00	96,80	954.631.029.391,25
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	554.788.007.088,20	540.705.653.691,71	97,46	588.135.137.073,25
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	142.297.972.970,76	140.412.905.162,00	98,68	66.603.353.711,35
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	9.031.400.000,00	7.020.158.000,00	77,73	7.620.200.000,00
36	**Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 35)**		**1.610.205.938.747,35**	**1.563.273.262.034,71**	**97,09**	**1.616.989.720.175,85**
37	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2				
38	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	1.590.000.402,00	1.582.111.000,00	99,50	52.138.000,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	87.232.797.590,00	81.140.289.274,00	93,02	63.674.475.281,36
40	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	29.291.732.701,50	28.705.510.386,09	98,00	207.849.221.679,34
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	137.868.905.945,00	132.171.625.497,00	95,87	217.388.334.422,16
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	30.950.372.575,10	28.212.477.647,00	91,15	28.468.841.417,00
43	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	187.903.000,00	187.140.000,00	99,59	965.589.500,00
44	**Jumlah Belanja Modal (38 s/d 43)**		**287.121.712.213,60**	**271.999.153.804,09**	**94,73**	**518.398.600.299,86**

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 Audited	%	REALISASI 2019 Audited
45	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.2.3				
46	Belanja Tak Terduga		120.289.696.930,00	105.185.265.046,92	87,44	71.758.500,00
47	**Jumlah Belanja Tak Terduga (46)**		**120.289.696.930,00**	**105.185.265.046,92**	**87,44**	**71.758.500,00**
48	**JUMLAH BELANJA (36+44+47)**		**2.017.617.347.890,95**	**1.940.457.680.885,72**	**96,18**	**2.135.460.078.975,71**
49	**TRANSFER**	5.1.3				
50	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	5.1.3.1				
51	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.1.3.1.1	14.115.450.372,00	13.792.042.093,85	97,71	10.999.975.718,00
52	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	954.144.750,00
53	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (51 s/d 52)**		**14.115.450.372,00**	**13.792.042.093,85**	**97,71**	**11.954.120.468,00**
54	**TRANSFER /BANTUAN KEUANGAN**	5.1.3.2				
55	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	329.490.094.800,00	328.688.033.926,00	99,76	313.889.016.200,00
56	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	983.963.400,00
57	**Jumlah Transfer / Bantuan Keuangan (55 s/d 56)**		**329.490.094.800,00**	**328.688.033.926,00**	**99,76**	**314.872.979.600,00**
58	**JUMLAH TRANSFER (53+57)**		**343.605.545.172,00**	**342.480.076.019,85**	**99,67**	**326.827.100.068,00**
59	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48+58)**		**2.361.222.893.062,95**	**2.282.937.756.905,57**	**96,68**	**2.462.287.179.043,71**
60	**SURPLUS/DEFISIT (29-59)**		**(176.500.198.604,26)**	**(27.061.440.076,44)**	**15,33**	**(61.255.226.307,85)**
61	**PEMBIAYAAN**					
62	**PENERIMAAN DAERAH**	5.1.4.1				
63	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.1.1	176.500.198.604,26	176.500.198.604,37	100,00	237.737.324.912,11
64	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.3	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4.1.4	0,00	31.700.000,00	0,00	18.100.000,00
67	**Jumlah Penerimaan (63 s/d 66)**		**191.500.198.604,26**	**176.531.898.604,37**	**92,18**	**237.755.424.912,11**
68	**PENGELUARAN DAERAH**	5.1.4.2				
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.4.2.1	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
70	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Jumlah Pengeluaran (69 s/d 70)**		**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	**PEMBIAYAAN NETTO (67-71)**	5.1.4	**176.500.198.604,26**	**176.531.898.604,37**	100,02	**237.755.424.912,11**
73	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (60+72)**	5.1.5	**0,00**	**149.470.458.527,93**	0,00	**176.500.198.604,26**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

BUPATI BLITAR

RINI SYARIFAH